

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI JAWA TENGAH

HANDLING CHILD DROP OUT OF SCHOOL IN CENTRAL JAVA

Mursid Zuhri, Resti Dwiyantoro

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

Email: zmursid_2010@yahoo.co.id

ABSTRACT

In 2011 Human Development Index ranking (Human Development Index) Indonesia dropped in position 69 of 127 countries drop out rate in Central Java at primary level is quite high. A total of 527 850 children or 1.7% of the 31.05 million children drop out of school each year. The decline in the composite index of education, as the pressures of poverty causes poor families are forced to sacrifice the continuity of children's education. Spread the dropout rate for elementary education / MI RPJMD is already close to the target of 0.12% by 2013. But there are still quite high at 501 for cilacap District, 542 Brebes and Tegal 499. For MI SD is relatively small compared Cilacap, 34, 130 and Bradford counties Tegal 54 As for the education level of SMP / MTS Cilacap, 290 Brebes Tegal 612 and 643. While MTS Cilacap, 118 districts Brebes and Tegal 109 and 125 (source Disdik Prov). Based on field data, the number of school dropouts is much higher. Causes of school children is because children from poor keluarga generally forced to work to help their parents, both in the domestic activities of the household and for public sector jobs that generate income: Child labor is treated as a substitute bp / mother, their time is taken engage in productive and domestic activities. The main zoning model of community involvement in the school (PKBM, SATAP) realistic enough to be developed, and the involvement of the Board of Education committee on the level needs to be increased role dikembangkan upt ill and confined to the Division of alternative management and financing of education in the treatment of ATS. Recommendations that can be delivered is through the handling model school children should learn from empirical conditions in these areas, through revitalization, facilitation (1) Community Learning Center Group (PKBM) in certain areas (2) SATAP for junior high school particularly isolated areas. Providing PKBM for children out of school and out of school is very helpful for those who can not afford the time and willingness. As happened in the village PKBM Malahayu unatuk pastoralist cattle, goats; PKBM in Nusawungu and PKBM in Pangkah, Kedungreja; Socialization Program Fair 9-year improved. While also optimizing the role of the Board of Education, the School Committee Level Forum Communications Unit and the School Committee Joint Education Unit Level SKPD not limited to education alone.

Keywords: *School Children, Compulsory Education, Primary Education.*

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Tengah sebaran angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sudah mendekati target RPJMD yaitu 0,12% pada tahun 2013. Namun masih cukup tinggi yaitu 501 untuk

Kabupaten cilacap, 542 kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal 499. Untuk MI relatif kecil dibandingkan SD yaitu Kabupaten cilacap, 34, kabupaten Brebes 130 dan Kabupaten Tegal 54 Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP /MTS

Kabupaten Cilacap, 290 Kabupaten Brebes 612 dan Kabupaten Tegal 643. Sedangkan MTS Kabupaten Cilacap, 118 Kabupaten Brebes 109 dan Kabupaten Tegal 125 (sumber Disdik Prov).

Berdasarkan data lapangan jumlah anak putus sekolah lebih tinggi, yaitu sebesar 0,72% pada tahun 2009, namun sudah melampaui target pada tahun 2009 sebesar 0,83%. Target angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2010 sebesar 0,24%. Sedangkan untuk SMP/MTs target pada tahun 2010 sebesar 0,68%. Angka putus sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar 0,17% dan target pada tahun yang sama sebesar 0,11%. Target angka putus sekolah pada tahun 2010 sebesar 0,10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target angka putus sekolah pada tahun 2009 belum tercapai. Dengan melihat data tersebut di atas, maka terdapat tugas berat bagi pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan Wajar Pendidikan dasar Sembilan tahun (Wajar Dikdas Dikdas 9 Tahun). Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian penanganan anak putus sekolah keterkaitan dengan program (Wajar Dikdas 9 Tahun) di Jawa Tengah.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian *desk research*, yaitu melakukan kajian referensi yang relevan dengan obyek penelitian dengan menggunakan data existing suatu wilayah dan informasi yang diperlukan dalam analisis masalah. Jenis Penelitian adalah evaluatif. Penelitian evaluatif penting dilakukan mengingat evaluasi memainkan sejumlah fungsi

utama dalam analisis kebijakan yaitu :Pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui pendekatan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dapat dikritik dengan menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai ataupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode – metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. (Dunn, 2000:609-610).

HASIL

1. Deskripsi Responden

Dari 130 responden yang tersebar di 10 desa pada 6 kecamatan pada umumnya adalah penduduk berumur 12 – 50 tahun dengan pendidikan rata-rata tidak sekolah dan tidak lulus Sekolah Dasar dengan proporsi 40 persen anak putus sekolah 40 persen orang tua anak putus sekolah dan 20 persen institusi, baik formal maupun non formal yang terkait dengan dunia pendidikan.

2. Distribusi Anak Putus Sekolah Usia 7 – 15 Tahun (Wajar Dikdas 9 tahun)

Di Kabupaten: Brebes, Tegal dan Cilacap sebagai berikut:

Tabel 4 Distribusi Anak Putus Sekolah Usia 7 – 15

No	Kecamatan	Jumlah usia 7 -15 tahun	Jumlah anak putus sekolah 7 – 15 tahun	% Anak tidak sekolah 7-15 Tahun	% Anak sekolah 7-15 Tahun
1	Losari	3343	320	9,5	90,5
2	Banjarharjo	1800	540	30	70
3	Pangkajene	660	200	30	70
4	Surodadi	907	225	23,8	76,2
5	Nusawungu	538	130	24	76
6	Kedungrejo	320	190	59	41

Sumber data primer diolah,2012

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya anak putus sekolah didominasi wilayah-wilayah yang berbatasan antar provinsi (dengan wilayah Jawa Barat) dan antar kabupaten dalam provinsi Jawa Tengah. Pada lokasi-

lokasi sampel diduga masih banyak anak putus sekolah, bahkan tidak sekolah. Terbukti pada Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes anak pusut sekolah hampir mencapai lima ratus anak.

3. Faktor Anak Putus Sekolah Wajar Dikdas 9 Tahun

Tabel 5 Faktor Anak Putus Sekolah

No	Faktor Dominan	Responden	%
1	Bantu orang tua	5	3
2	Bekerja	50	38
3	Malas/kurang minat	15	11,5
4	Kondisi lingkungan tempat tinggal dan fungsi kelembagaan yang belum maksimal	10	7,7
5	IQ rendah	2	1,5
6	Cacat fisik	4	3
7	Kawin muda	7	5
8	Ikut orang tua	12	9
9.	Pandangan masyarakat terhadap Pendidikan dan pendidikan orang tua	10	10
10	Bolos	5	16
11	Ekonomi keluarga	34	23,3
	Jumlah	130	100

Sumber : Data primer diolah, 2012

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa anak putus sekolah oleh karena bekerja dan faktor ekonomi cukup tinggi, secara empiris pada umumnya anak-anak

mengikuti/diajak orang tua ke luar daerah seperti Jakarta,Cirebon dan lainnya untuk membantu bekerja orang tua pada sektor tertentu.

4. Distribusi Anak Putus Sekolah Menurut Wilayah Kecamatan

Tabel 6. Distribusi anak putus sekolah menurut wilayah kecamatan

Kecamatan	Faktor Anak Putus Sekolah												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah		
Losari	1	12	7	6	0	0	6	2	0	2	36		
Banjarharjo	25	3	0	0	0	0	0	0	0	15	43		
Surodadi	0	4	32	0	0	1	5	9	0	0	51		
Pangkah	1	1	1	2	2	2	1	1	1	5	17		
Nusawungu	1	27	5	10	0	0	26	3	0	5	77		
Kedungreja	1	27	0	17	0	0	19	0	0	0	64		
Jumlah	29	74	45	35	2	3	57	15	1	27	288		

menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes mendominasi anak putus sekolah atau tidak sekolah karena faktor kultur dan faktor kemiskinan

Faktor Penyebab anak putus sekolah

1. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua
2. Lemahnya Ekonomi Keluarga
3. Kurangnya Minat Anak Untuk Bersekolah

Tinggal Anak

5. Fungsi kelembagaan yang belum maksimal

5. Model Program Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun

1. Model Keterlibatan Masyarakat Dalam Sekolah
2. Model Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kewilayahan
3. Model Pembagian Urusan dan Pendanaan Pendidikan

PEMBAHASAN

Hasil penelitian sebagaimana dideskripsikan sebelumnya menjadi materi dasar dalam membangun argumentasi untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian yang ada. Lebih lanjut akan dilakukan pembahasan dalam tiga kerangka pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. sebaran (identitas, jumlah dan kategori) anak putus sekolah di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Cilacap,
2. faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Cilacap dan
3. Model penuntasan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Cilacap
4. Berdasarkan identifikasi dan analisis data sekunder diperoleh angka bahwa anak putus sekolah usia 7 – 15 tahun berjumlah 2,4 juta (20 – 30% dari jumlah keseluruhan anak Indonesia). Sedangkan anak putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 909.823 orang (sekitar 20 % dari jumlah anak usia 0-18 tahun di Jawa Tengah). Penyebab anak putus sekolah karena anak-anak dari keluarga miskin umumnya terpaksa bekerja untuk membantu orang tua, baik dalam kegiatan domestik rumah tangga maupun untuk pekerjaan di sektor publik yang menghasilkan pendapatan (anak diperlakukan sebagai tenaga substitusi bapak, ibu dan waktu mereka tersita untuk terlibat dalam kegiatan produktif dan kegiatan domestik).
5. Beberapa aspek yang menyebabkan anak putus sekolah umumnya terkait erat dengan:
 - a. Kultur yang ada di desa, bahwa anak harus membantu orang tua bekerja mencari nafkah meskipun masih dalam usia sekolah;

- b. Kemiskinan perdesaan maupun perkotaan yang menjadi kantong kemiskinan umumnya juga menjadi kantong anak putus sekolah dan bahkan anak tidak sekolah;
- c. Usia anak. Pada usia anak 7 – 12 tahun (SD sederajat) disamping DO cukup tinggi, juga tinggi dalam hal tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Pada anak usia 13-15 tahun tingkat DO baik laki-laki maupun perempuan tinggi juga,
- d. Tempat tinggal. Dusun yang terpencar-pencar secara geografis dan berlahan kering mendorong tingginya anak putus sekolah.
- e. Pendidikan ibu. Orang tua, utamanya ibu, yang rendah tingkat pendidikannya menunjukkan titik rawan terjadinya anak putus sekolah karena mereka tidak mampu membimbing dan memberikan motivasi belajar anaknya;
- f. Lingkungan: wilayah permukiman yang tidak memiliki “tradisi bersekolah”, kecil dorongannya terhadap semangat belajar anak-anak;
- g. Tokoh: Dusun atau desa yang tidak memiliki pioneer/role model atau tokoh yang peduli pendidikan dapat menjadi titik rawan anak putus sekolah atau tidak sekolah;
- h. Banyak godaan: Wilayah (dusun, desa /kelurahan) yang berbatasan dengan kota, perusahaan, dll besar godaannya bagi anak untuk tidak atau putus sekolah karena tergoda mendapatkan uang tunai secara cepat/mudah,
- i. Rumah tangga banyak anak: orangtua/rumah tangga dengan jumlah anak banyak menghadapi kesulitan untuk menanggung biaya harian bersekolah (seperti uang jajan, transport, alat tulis/buku dan lain-lain)

6. Model Keterlibatan Masyarakat dalam Sekolah terutama Pusat Kelompok Belajar Masyarakat cukup realistis untuk dikembangkan dalam mengatasi anak putus sekolah, demikian pula model perwilayahan dan Pembagian Urusan dan Pendanaan Pendidikan serta peningkatan peran dewan pendidikan dan komite sekolah layak dikembangkan.
7. Dengan urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang selama ini bersifat tumpang-tindih antar-tingkat pendidikan, dimungkinkan terciptanya anggaran pendidikan yang tidak berkeadilan. Para siswa di daerah yang kaya mampu memberikan tambahan dana pendidikan yang signifikan, dan sebaliknya bagi daerah miskin. Misalnya dalam subsidi BOS, daerah yang sangat kaya dapat menambah besarnya biaya operasi sekolah per kapita yang diperoleh dari anggaran BOS propinsi dan kab/kota, sementara itu daerah miskin tidak mampu melakukan hal yang sama.
8. 20% anggaran pendidikan pada tingkat Pusat telah melahirkan jumlah yang sangat besar (hampir 300 T). Dengan ketentuan bahwa anggaran pendidikan termasuk gaji guru dan pendidikan kedinasan, maka kue anggaran pendidikan tersebut tetap menjadi kue yang dapat diakses oleh sejumlah kementerian yang melaksanakan fungsi pendidikan. Akibatnya, hanya menyisakan sekitar 65-70 Trilyun atau hanya 25% untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, sehingga telah menyimpang dari semangat Amandemen ke-4 UUD 1945 pada tahun 1999.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari hasil analisis adalah bahwa secara umum daya

saing daerah kota lebih baik dari kabupaten.

1. Anak putus sekolah adalah fakta riil, maka:

Pertama perlu diambil kebijakan yang realistis agar jumlah anak putus sekolah semakin berkurang melalui revitalisasi/remodifikasi metode pembelajaran dan jadwal penyelenggaraan PKBM agar anak putus sekolah dan anak tidak sekolah tertarik mau belajar lagi. Kedua, kampanye “kembali bersekolah” sebagai gerakan bersama secara kontinu. Ketiga, perlu ada bantuan operasional anak tidak sekolah dan putus sekolah, mengingat BOS terfokus semata-mata untuk anak yang sekolah. Putus sekolah lebih sering terjadi pada anak yang berada di tingkat SD dan SMP, maka pertama, kebijakan menjadikan SD/MI sebagai “terminal” harus dihapus dengan cara tidak ada Ujian Nasional (UN) dan ijazah di SD/MI. Ujian nasional (dan ijazah) baru dilaksanakan di SMP/MTs. Dengan demikian akan terkikis persepsi masyarakat bahwa lulus SD saja sudah cukup, di samping juga akan dapat mempercepat penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun pasti dapat menjadi pendorong untuk wajib belajar 12 tahun sebagaimana dirancang mulai tahun 2012. Kedua, penyelenggaraan sekolah satu atap SD-SMP (satap) perlu diperbanyak di daerah yang lokasi SMP nya jauh, dan pengajar satap harus sesuai dengan kualifikasi ijasahnya, bukannya pengajar SD merangkap SMP.

2. Perlu ada kebijakan yang dapat memacu rumah tangga untuk menyekolahkan anaknya. Pertama, tidak ada uang pendaftaran sekolah atau iuran lain yang memberatkan; Kedua, pakaian seragam anak sekolah tidak perlu diwajibkan, dan Ketiga,

- setiap sekolah wajib menyediakan kantin sehat dan anak-anak didorong untuk membeli makanan di kantin, bukan kepada penjaja di luar sekolah.
3. Angka tidak melanjutkan sekolah dapat ditekan melalui:

Pertama, perbaikan proses pembelajaran guru dari teacher-center ke child-center sehingga anak-anak senang belajar di jenjang manapun;

Kedua, sekolah memiliki mekanisme jelas dalam mengatasi tindak kekerasan antar siswa (termasuk bullying) atau tindak kekerasan guru terhadap siswa.

Ketiga, nilai tambah (added value) bersekolah di jenjang SMP harus benar-benar dilihat/dirasakan oleh masyarakat sehingga rumahtangga tertarik dan mendorong anak-anaknya melanjutkan ke jenjang SMP karena anaknya akan memperoleh ketrampilan-ketrampilan vokasional.

Keempat, penyediaan semacam bus sekolah di daerah-daerah yang jarak jangkauan maupun akses transportasinya sulit.
 4. Belum diperhitungkan partisipasinya :

Pertama, pendidikan prasekolah perlu dijadikan sebagai persyaratan untuk pendidikan dasar. Dengan demikian diharapkan partisipasi masyarakat/rumahtangga dalam pendidikan prasekolah semakin tinggi.

Kedua, terjalin/terjaganya metode pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan prasekolah anak usia dini (AUD) yang menyenangkan dan dinamis, dengan metode pembelajaran dan penyelenggaraan di pendidikan dasar.
 5. Titik kritis/rawan anak putus sekolah umumnya terkait erat dengan :
 - a. Titik rawan anak putus sekolah tersebut dapat diatasi bersama melalui: pertama, perlu digalakkan comprehensive parenting education (pendidikan untuk orang tua).
- Institusi seperti pemerintah desa, tim penggerak PKK, dan lain-lainnya bekerja bersama untuk melakukan pendidikan bagi orang tua tentang semua aspek kehidupan rumah tangga terkait dengan pendidikan anak.
- b. Kedua, ada alokasi anggaran desa secara rutin untuk mengatasi anak putus sekolah
 - c. Ketiga, tokoh-tokoh lokal/setempat yang peduli pendidikan dilibatkan terus dalam upaya meningkatkan pendidikan anak-anak setempat.
6. Alternatif Solusi

Untuk permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan secara struktural terhadap anggaran pendidikan nasional menuju anggaran yang lebih berkeadilan. Untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan perlu diatur share anggaran pendidikan secara tegas antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Setiap tingkat pemerintahan harus mengalokasikan anggaran yang menjadi urusan dan tanggungjawabnya masing-masing. Anggaran pendidikan yang adil bermuara pada peserta didik secara perorangan, dan tidak ada hambatan apapun bagi anak-anak di daerah manapun juga untuk tidak bersekolah karena faktor biaya. Untuk mengetahui berapa besar setiap tingkat pemerintahan dapat mengalokasikan anggarannya untuk pendidikan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

 - a. Perlu dilakukan perhitungan biaya pendidikan secara nasional untuk mewujudkan mutu, relevansi dan keadilan pendidikan bagi semua anak bangsa. Perhitungan tersebut di dasarkan pada jumlah peserta didik, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, dikalikan dengan besaran biaya satuan yang ideal

- dengan target mutu yang ditentukan sesuai dengan keinginan (misalnya sama dengan biaya Satuan pendidikan di Malaysia).
- b. Jika sudah ditemukan besaran biaya pendidikan nasional sebesar 20% (sebesar 300 trilyun rupiah) dari APBN misalnya sebesar Rp. 1.500 trilyun rupiah maka selanjutnya beban pembiayaan dibagi ke masing-masing tingkat pemerintahan, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah didistribusikan. Sesuai dengan beban tugasnya, Pusat menanggung 20% (Rp. 60 trilyun rupiah), Provinsi 30% (Rp. 90 trilyun rupiah, atau rata-rata 2,71 trilyun rupiah per provinsi), dan Kab/kota 50% (Rp. 150 trilyun rupiah, atau rata-rata Rp. 300 milyar rupiah per kab/kota).
 - c. Dari perhitungan di atas, maka(1) APBN hanya perlu mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp. 60 trilyun, untuk melaksanakan tugas dalam pengendalian mutu, pengembangan kebijakan, penyelenggaraan pendidikan kebangsaan, dan subsidi penyeimbang bagi daerah yang kekurangan anggaran; (2) setiap provinsi perlu mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp. 2,7 trilyun untuk melaksanakan tugas pengadaan infrastruktur sekolah, pengembangan kurikulum sains/teknik, serta pendidikan dan pelatihan guru; dan (3) setiap kab/kota perlu mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 300 milyar rupiah untuk mendanai BOS, gaji dan honor guru, dan pengembangan kurikulum life skill.
 - d. Prasyarat untuk dilakukannya pendekatan pembiayaan pendidikan nasional tersebut adalah menyesuaikan kembali legislasi nasional berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan desentralisasi fiskal. Gagasan alternatif ini tentu memerlukan penelitian dan kajian kebijakan yang cermat dan hati-hati, baik dalam menentukan biaya satuan, analisis pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan desentralisasi fiskal. Kajian tersebut pasti tidak mudah dan memerlukan keahlian serta kesabaran, tetapi alternatif ini memberikan nuansa pemikiran alternatif setidaknya dapat memperluas wawasan para peneliti dan analis kebijakan.
7. Model penanganan anak putus sekolah harus belajar dari kondisi empirik pada daerah-daerah tersebut, yaitu terdapat beberapa kegiatan yang sedang berlangsung relatif efektif seperti (1) Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) pada wilayah-wilayah tertentu (2) Satap untuk Sekolah Menengah Pertama. Penyelenggaraan PKBM untuk anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah sangat membantu bagi mereka yang tidak mampu dan ketersediaan waktu. Seperti yang terjadi pada PKBM di Desa Malahayu untuk para penggembala sapi dan kambing; PKBM di Nusawungu dan PKBM di Pangkah dan Kedungreja;

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi, 1999 Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka
- Agung Purwadi, 1998, "Beberapa Gagasan tentang Reformasi Pendidikan Menengah Kejuruan" dalam kajian pendidikan dan kebudayaan No. 014/V/September 1998 Jakarta, Balitbang Depdikbud
- Bailey, Kenneth B, 1989, *Methods of Social Research*, The Free Press, Collier Macmillan, London
- Balitbang Provinsi Jawa Timur, 2004, "Peluang dan Tantangan Mengatasi Pencaker di Jatim" Jurnal Cakrawala, Edisi I, Bulan ke-6
- BKKBN Jawa Tengah, Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, 2008
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PP No 31 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja nasional;
- Dunn, William, 2004, *Public Policy Analysis : An Introduction*, Prentice Hall, Simin & Shuster Company Engelwood Clifts, New York
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan
- Gatot PH 2000 "Pendidikan Kejuruan" Makalah pada Konvensi Pendidikan Nasional di UNJ
- Gusrizal 2002, "Pelaksanaan Uji Kompetensi SMK dan Implikasinya pada Instrumen Mata Uji" dalam Buletin Pembelajaran No. 02 Tahun 25 Juni 2002
- HAR Tilaar, dalam Ace Suryadi, Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka
- Indrajati Sidi, 2002 Menuju Masyarakat Pembelajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Jakarta Paramadina bekerjasama dengan Logos Wacana Ilmu
- PP No. 23 Th. 2004 tentang Badan Nasional Sertifikat Profesi Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 No 78 Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 4408
- Rencana Strategis Depdiknas, 2001
- Windham, Douglas, Prof. Ph.D. & Henry Levin, Prof. Ph.D.(1990) *The Analysis of educational Productivity: Issues in Macro Analytical Perspective*. London, New York, Ballinger Publishing Company.
- William Dunn, Kebijakan Publik, 2000
- Mudyahardjo Redja, 2001:3). Dalam Ace Suryadi, Wacana Pembagian Urusan antar tingkat pemerintahan serta implikasi terhadap pembiayaan pendidikan;
- Sutopo HB, Metodologi Penelitian Kualitatif, 1988
- Subarsono. 2005 Metode Pengumpulan Data Analisis Kebijakan Publik